



PENDAMPINGAN PEMBUATAN PERIZINAN USAHA KECIL MENENGAH PADA ANGGOTA LENTERA UKM MANADO

Oleh

Trintje Lambey¹, Lisbeth Lesawengan², Juliana Lumintang³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: ¹lambeytrintje@unsrat.ac.id, ²lesawengan@unsrat.ac.id,

³julianalumintang@unsrat.ac.id

Article History:

Received: 06-06-2026

Revised: 02-07-2026

Accepted: 09-07-2026

Keywords:

Perizinan, Usaha Kecil,
Lentera

Abstract: Legalitas usaha mempunyai banyak kegunaan untuk para wirausaha antara lain untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum, mempermudah pengembangan pemasaran usaha dalam berbagai cakupan, serta mempermudah akses program pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah. Dengan begitu, kepemilikan legalitas usaha menjadi kewajiban bagi setiap wirausaha. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada kelompok Lentera UKM ini sangat bermanfaat bagi para wirausaha kecil, khususnya dalam pengurusan perizinan dalam berusaha sebelumnya adanya legalitas usaha dianggap tidak terlalu penting karena pengurusannya merepotkan dan tidak mudah, namun sangat disadari para pelaku usaha kecil memerlukan perizinan usaha guna keberlangsungan usahanya dan juga untuk mendapatkan perlindungan lokasi usaha. Beberapa metode dan tahapan yang digunakan pada saat pelaksanaan adalah persiapan, penyusunan perencanaan program, pasca survei dan data yang telah didapatkan, Implementasi, Monitoring dan evaluasi. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masih pengetahuan anggota kelompok yang masih kurangnya akan cara mengurus perizinan usaha, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bisnis yang biasanya digunakan oleh sebagian masyarakat guna mencari nafkah guna memperbaiki kehidupan baik dari segi pengembangan ekonomi mikro dan makro di Indonesia¹. UMKM mempunyai peran besarpadapembangunan dan perkembangan ekonomipada negara-negara di dunia secara umum. Di Indonesia UMKM berpengaruh dalam mereduksi kemiskinankarena usaha kecilbisa digunakan sebagai pembuka lapangan kerja baru dan juga sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat menengah.

Legalitas usaha merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan adanya legalitas usaha, suatu kegiatan usaha dapat terlindungi, dinyatakan legal, serta dapat diakui oleh masyarakat umum. Pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha ini ditujukan kepada pihak UMKM yang belum mempunyai legalitas usaha. UMKM yang terpilih dalam pendampingan ini yaitu, Kelompok Lentera UKM Manado. Beberapa dokumen pendampingan legalitas usaha yang



akan dibuat oleh Tim yaitu, Nomor Induk Berusaha (NIB), HaKI, dan material promosi usaha dengan pembuatan Instagram serta Google Business Review.

Pemerintah Indonesia dalam pengembangan usaha kecil telah menetapkan berbagai kebijakan dari segi permodalan, kemitraan, legalitas usaha, dan juga dukungan kelembagaan, baik melalui penyediaan fasilitas dan kegiatan pelatihan serta pendampingan³. Salah satu faktor penting dari beberapa ketentuan diatas ialah adanya legalitas usaha. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai perizinan dalam berusaha berdasarkan risiko kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Perizinan dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan agar kegiatan sosial dan ekonomi yang dijalankan para wirausaha dapat terkendali. Dalam hal ini legalitas usaha merupakan jati diri yang menandakan badan usaha tersebut telah legal atau sah dimata hukum sehingga membuat para wirausaha menjadi mudah dalam mengakses permodalan guna pengembangan usaha dan agar mampu bersaing pada dunia bisnis.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam mendapatkan perizinan usaha secara resmi, sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan mendapatkan berbagai manfaat dari status usaha yang sah. Dengan memiliki izin usaha, UKM dapat berkembang lebih stabil, berkesinambungan, dan mampu bersaing dalam jangka Panjang selain itu Perizinan usaha membuat UKM lebih profesional, meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan, dan membuka peluang kerja sama dengan pihak lain.

METODE

1. Perencanaan Kegiatan

Sebelum pendampingan dimulai, beberapa hal yang perlu disiapkan:

- ☒ Identifikasi Sasaran UKM → Menentukan sektor usaha dan tingkat kesiapan mereka dalam mengurus izin.
- ☒ Pemetaan Kebutuhan Perizinan → Menyesuaikan jenis perizinan yang diperlukan, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT, BPOM, Sertifikat Halal, dan izin lingkungan.
- ☒ Penyusunan Materi dan Modul → Berisi informasi tentang prosedur perizinan, manfaat legalitas usaha, dan simulasi pengisian dokumen.
- ☒ Koordinasi dengan Instansi Terkait → Melibatkan Dinas Koperasi & UKM, DPMPSTP, BPOM, MUI, atau lembaga terkait agar proses lebih efektif.

2. Metode Pelaksanaan Pendampingan

A. Sosialisasi dan Edukasi

- ◊ Seminar dan Workshop → Mengedukasi UKM tentang manfaat perizinan dan langkah-langkah pengurusannya.
- ◊ Penyuluhan langsung → Melalui pertemuan tatap muka atau daring untuk menjangkau lebih banyak pelaku UKM.
- ◊ Pembuatan Panduan Digital dan Cetak → Menyediakan buku panduan atau video tutorial agar UKM dapat mengakses informasi kapan saja.

B. Pelatihan dan Simulasi Pengurusan Perizinan

- ◊ Demonstrasi Pengisian Dokumen → Membimbing UKM dalam mengisi formulir perizinan seperti OSS, PIRT, dan Sertifikasi Halal.
- ◊ Latihan Menggunakan OSS (Online Single Submission) → Simulasi langsung dalam



pembuatan akun dan pendaftaran izin usaha secara online.

- ◊ Studi Kasus → Memberikan contoh nyata perizinan UKM yang telah berhasil diurus.

C. Pendampingan Individu atau Kelompok

- ◊ Bimbingan Teknis → Setiap UKM mendapat pendampingan khusus sesuai dengan jenis usaha dan izin yang dibutuhkan.
- ◊ One-on-One Coaching → Membantu UKM yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran atau pemenuhan syarat izin.
- ◊ Monitoring dan Evaluasi Berkala → Mengecek progres setiap UKM hingga izin resmi diperoleh.

D. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

- ◊ Kerja sama dengan dinas pemerintah untuk mempercepat proses perizinan.
- ◊ Melibatkan komunitas dan asosiasi UKM agar kegiatan lebih berkelanjutan.
- ◊ Mendukung akses ke permodalan setelah izin diperoleh, misalnya dengan mempertemukan UKM dengan lembaga keuangan.

3. Evaluasi dan Tindak Lanjut

- ✦ Kuesioner & Feedback → Mengukur pemahaman UKM setelah pendampingan.
- ✦ Pembuatan Laporan Perkembangan → Memonitor UKM yang sudah mendapatkan izin dan yang masih membutuhkan bantuan lebih lanjut.
- ✦ Pembentukan Komunitas atau Forum UKM → Sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang legalitas usaha.

HASIL

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu sosialisasi dan edukasi, pelatihan dan simulasi pengurusan perizinan, pendampingan individual maupun kelompok, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta evaluasi dan tindak lanjut.

1. Sosialisasi dan Edukasi

Tahapan awal kegiatan diawali dengan pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh anggota Lentera UKM Manado mengenai pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan UMKM. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat memahami manfaat memiliki izin usaha secara menyeluruh.

Materi yang disampaikan meliputi pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi pelaku usaha, manfaat sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, persyaratan administrasi dalam pengurusan izin usaha, hingga peluang yang dapat diperoleh apabila usaha telah memiliki legalitas, seperti akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan pemerintah, sertifikasi produk, serta peluang mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pada tahap ini ditemukan bahwa sebagian besar peserta belum memahami prosedur pengurusan izin usaha secara mandiri. Beberapa peserta bahkan beranggapan bahwa pengurusan izin usaha memerlukan biaya yang besar dan proses yang rumit. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai mekanisme perizinan yang sebenarnya relatif mudah apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.

**Gambar 1**

Diskusi berlangsung sangat aktif. Peserta menyampaikan berbagai kendala yang selama ini mereka alami, antara lain kurangnya literasi digital, keterbatasan akses informasi mengenai OSS, serta minimnya pendampingan dalam proses pengurusan izin usaha.

2. Pelatihan dan Simulasi Pengurusan Perizinan

Tahapan berikutnya berupa pelatihan teknis mengenai tata cara pengurusan izin usaha melalui sistem OSS. Peserta dibimbing secara langsung mulai dari proses pembuatan akun OSS, pengisian data identitas pelaku usaha, penginputan bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hingga proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pelatihan dilaksanakan menggunakan metode praktik langsung (learning by doing). Setiap peserta membawa telepon genggam maupun laptop sehingga dapat mengikuti setiap tahapan secara mandiri dengan pendampingan tim PKM.

Dalam simulasi tersebut peserta mempraktikkan beberapa tahapan penting, antara lain:

- * Registrasi akun OSS menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- * Verifikasi data pribadi dan data usaha.
- * Penentuan jenis usaha berdasarkan KBLI.
- * Pengisian lokasi usaha.
- * Pengunggahan dokumen pendukung.
- * Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Melalui simulasi tersebut peserta memperoleh pengalaman secara langsung sehingga tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mempraktikkan proses pengurusan izin usaha secara mandiri. Sebagian besar peserta berhasil menyelesaikan tahapan pendaftaran hingga memperoleh NIB pada saat kegiatan berlangsung, sedangkan peserta yang mengalami kendala teknis dijadwalkan untuk mendapatkan pendampingan lanjutan.

**Gambar 2**



3. Pendampingan Individu atau Kelompok

Tahapan inti dari kegiatan PKM adalah pendampingan secara individual maupun kelompok kepada anggota Lentera UKM Manado. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh peserta dapat menyelesaikan proses pengurusan legalitas usaha sesuai dengan kondisi masing-masing.

Pendampingan individual diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kendala khusus, seperti ketidaksesuaian data kependudukan, perubahan alamat usaha, pemilihan KBLI yang tepat, maupun kesulitan menggunakan perangkat digital. Tim PKM membantu peserta melakukan pengecekan data, memberikan solusi terhadap permasalahan administrasi, serta mendampingi hingga proses penerbitan izin usaha selesai.

Sementara itu, pendampingan kelompok dilakukan melalui klinik konsultasi yang memungkinkan peserta saling berbagi pengalaman dan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi. Pendekatan ini terbukti efektif karena peserta tidak hanya belajar dari narasumber, tetapi juga memperoleh pengalaman dari sesama pelaku usaha.

Selama proses pendampingan terlihat adanya peningkatan kepercayaan diri peserta dalam memanfaatkan layanan digital pemerintah. Peserta yang sebelumnya bergantung pada jasa pihak ketiga mulai mampu mengakses sistem OSS secara mandiri. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya pembaruan data usaha apabila terjadi perubahan kegiatan usaha di kemudian hari.

4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Keberhasilan kegiatan PKM tidak terlepas dari adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pengembangan UMKM. Tim PKM membangun kerja sama dengan pengurus Lentera UKM Manado sebagai mitra utama dalam mengorganisasi peserta dan mengidentifikasi kebutuhan anggota.

Selain itu, kegiatan juga melibatkan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan perizinan usaha, khususnya perangkat daerah yang menangani penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kehadiran narasumber dari instansi terkait memberikan informasi yang akurat mengenai kebijakan terbaru terkait OSS berbasis risiko, prosedur pelayanan perizinan, serta mekanisme konsultasi apabila pelaku usaha mengalami kendala setelah kegiatan selesai.

Kolaborasi ini menghasilkan sinergi yang positif antara perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas UMKM. Perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator dan pendamping, pemerintah menyediakan informasi dan pelayanan publik, sedangkan Lentera UKM Manado menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan berbagai program pemberdayaan.

Melalui kolaborasi tersebut juga dibangun komitmen untuk melanjutkan pendampingan pada bidang lain, seperti pengurusan sertifikasi halal, PIRT, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelatihan pemasaran digital, dan peningkatan kapasitas manajemen usaha.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan PKM. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, diskusi kelompok, wawancara singkat dengan peserta, serta penyebaran kuesioner mengenai tingkat kepuasan terhadap kegiatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan memperoleh respons yang sangat positif dari peserta. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan mudah dipahami, narasumber mampu menjelaskan prosedur secara sistematis, serta pendampingan yang diberikan sangat membantu dalam menyelesaikan proses pengurusan izin usaha.



Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari kemampuan mereka menjelaskan kembali tahapan pengurusan NIB serta mempraktikkan penggunaan sistem OSS secara mandiri. Selain itu, peserta juga menyadari bahwa legalitas usaha bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Sebagai tindak lanjut, tim PKM bersama pengurus Lentera UKM Manado menyusun rencana pendampingan berkelanjutan bagi anggota yang belum menyelesaikan proses perizinan. Tim juga membuka layanan konsultasi secara daring sehingga peserta dapat memperoleh pendampingan apabila mengalami kendala pada tahap berikutnya.

Selain pendampingan legalitas usaha, direncanakan pula kegiatan lanjutan berupa pelatihan pengelolaan keuangan UMKM, pemasaran digital, pengembangan kemasan produk, sertifikasi halal, serta penguatan jejaring usaha. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak berhenti pada penerbitan izin usaha semata, tetapi menjadi langkah awal dalam membangun UMKM yang legal, mandiri, kompetitif, dan berdaya saing di Kota Manado.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan PKM **"Pendampingan Pembuatan Perizinan Usaha Kecil Menengah pada Anggota Lentera UKM Manado"** telah mencapai tujuan yang diharapkan. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan anggota Lentera UKM Manado dalam mengurus legalitas usaha melalui sistem OSS, memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan komunitas UMKM, serta membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas melalui kepemilikan izin usaha yang sah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Pendampingan Pembuatan Perizinan Usaha Kecil Menengah pada Anggota Lentera UKM Manado" telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tahapan yang direncanakan, yaitu sosialisasi dan edukasi, pelatihan dan simulasi pengurusan perizinan, pendampingan individu maupun kelompok, kolaborasi dengan pihak terkait, serta evaluasi dan tindak lanjut. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara partisipatif dengan melibatkan anggota Lentera UKM Manado sebagai peserta aktif dalam setiap proses pembelajaran dan pendampingan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selanjutnya, pada tahap pelatihan dan simulasi, peserta berhasil meningkatkan keterampilan teknis dalam mengakses sistem OSS, mengisi data usaha, serta memahami prosedur penerbitan izin usaha secara mandiri.

Pendampingan yang dilakukan secara individual maupun kelompok terbukti mampu membantu peserta mengatasi berbagai kendala administratif dan teknis selama proses pengurusan perizinan. Selain itu, kolaborasi antara tim PKM, pengurus Lentera UKM Manado, dan instansi pemerintah terkait memberikan dukungan yang efektif sehingga proses pendampingan berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usahanya. Dengan semakin banyaknya anggota yang memiliki atau sedang dalam proses memperoleh izin usaha, diharapkan akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan pemerintah, kemitraan usaha, dan pengembangan pasar akan



semakin terbuka.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Diucapkan terima kasih kepada pihak terkait kegiatan PkM ini:

1. Universitas Sam Ratulangi memberikan biaya pelaksanaan melalui anggaran PNBPN Unsrat tahun 2025
2. Pengurus Lentera UKM Manado
3. Anggota Lentera Manado

DAFTAR REFERENSI

- [1] Sri Mulyani, Karisma Yulia Putri, Galuh Candra Kirana, Muhammad Irsyadussahlan, Sofyan Akhmad Ariz, & Meyla Nur Vita Sari. (2024). Pendampingan Pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk Para Pelaku Usaha Kecil Di Desa Gedangan, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 179–189. Retrieved from <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/1515>
- [2] Prima Asti Winanti. 2024. Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Media Abdimas Vol 3 No 3 Oktober 2024*. E-ISSN: 2964-6952 P-ISSN: 2964-6855
- [3] Ahmad Faiz Shobir Alfikri. 2024. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49-62.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN